

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

Demikian pula ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, bisa mengakibatkan rendahnya fertilitas dan rendahnya angka pertumbuhannya. Ketidakseimbangan itu akan mempengaruhi pola keadaan sosial, ekonomi, dan keluarga.

Hal ini dapat memberikan beberapa permasalahan kependudukan di Indonesia yaitu masalah kuantitas dan kualitas penduduk. Adapun masalah-masalah kependudukan tersebut adalah jumlah penduduk besar, pertumbuhan penduduk cepat, persebaran penduduk tidak merata, kualitas penduduk rendah, komposisi penduduk sebagian besar berusia produktif.

Penduduk dalam suatu negara merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subyek dan obyek pembangunan. Penduduk merupakan pusat seluruh kebijakan dan program

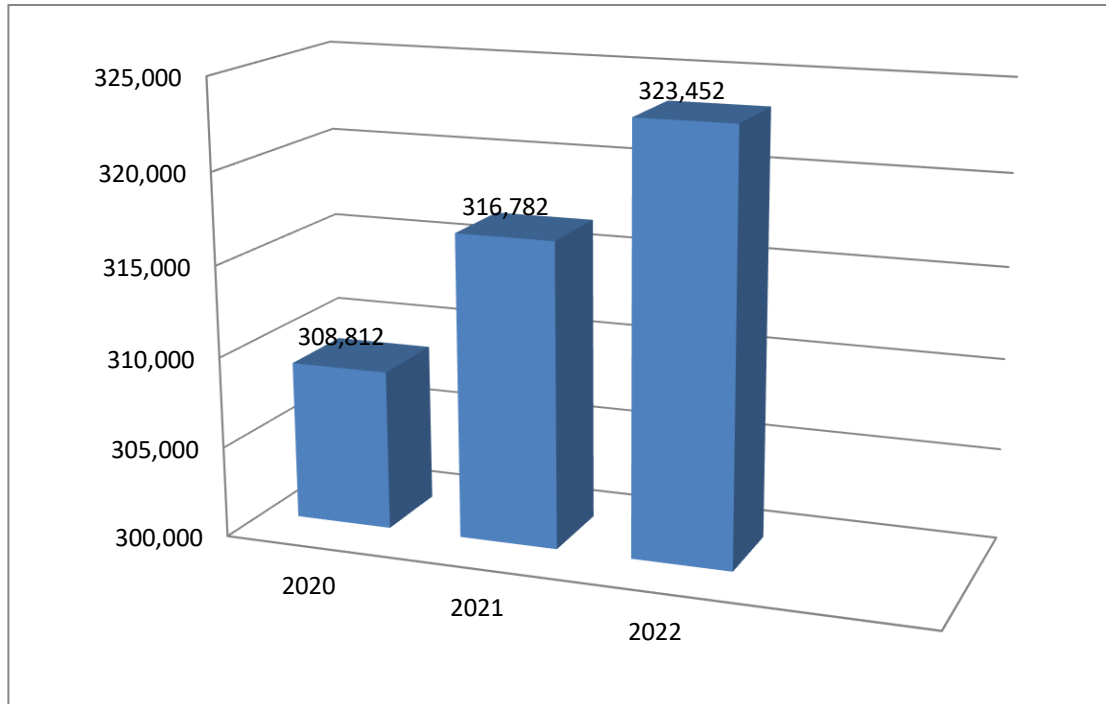
pembangunan yang dilakukan. Pembangunan dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk baik kualitas fisik maupun non fisik. Dinamika atau perubahan jumlah penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan.

Besarnya jumlah penduduk di Indonesia harusnya dapat diseimbangkan dengan kualitas penduduknya pula. Kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia yaitu tingkat kemampuan penduduk dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraannya. Mutu sumber daya manusia pada suatu negara dapat dilihat dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatannya.

Jumlah penduduk yang besar dalam suatu negara dengan kualitas yang rendah, merupakan beban atau tanggungan bagi pemerintah. Setiap negara selalu mengupayakan peningkatan kualitas penduduknya. Salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup.

Berdasarkan situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa Kota Dumai memiliki jumlah penduduk sebanyak 308.812 jiwa pada tahun 2020, 316.782 jiwa pada tahun 2021, dan 323.452 jiwa pada tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dari diagram I.1 dibawah ini :

Diagram I.1
Data Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2022



Sumber : Website Badan Pusat Statistik Kota Dumai

[\(https://dumaikota.bps.go.id/\)](https://dumaikota.bps.go.id/)

Berdasarkan diagram I.1 tersebut menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan angka pertumbuhan penduduk. Kasus peningkatan penduduk ini bisa saja terjadi setiap tahunnya jika pemerintah daerah kurang menguatkan program kependudukan di kota Dumai.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan :

- a. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera;
- c. Meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas; dan
- d. Menyediakan Data dan Informasi Keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Keluarga Berencana adalah merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan kemandulan, dan penjarangan kelahiran. Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran. Keluarga Berencana yaitu proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga disebutkan dalam pasal 1 ayat 8 bahwa, Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Tujuan Keluarga Berencana yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Di samping itu, Keluarga Berencana diharapkan dapat menghasilkan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sasaran dari program Keluarga Berencana, meliputi sasaran langsung, yaitu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Dan sasaran tidak langsung yang terdiri dari pelaksana dan pengelola Keluarga Berencana, dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.

Dalam upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Dumai

memiliki tujuan yang secara umum adalah meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui salah satu program yaitu Keluarga Berencana (KB). Secara demografi dinas ini bertujuan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Pengaturan kelahiran perlu terus diupayakan melalui program Keluarga Berencana untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang.

Dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 79 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yang dimana pada pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Selanjutnya dalam pasal 4, tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. Pelaksaaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai menerapkan mekanisme kerja berdasarkan turunan dari tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam

bidang Keluarga Berencana yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh subkoordinator substansi yang terdiri dari :

a. Substansi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi

Substansi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi bertugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di tingkat daerah.

b. Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana bertugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan keluarga berencana di daerah.

Jaminan pelayanan program keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai akan dilaksanakan bersama puskesmas sebagai mitra kerja yang merupakan fasilitas kesehatan umum untuk melayani masyarakat perihal kesehatan.

Pelaksanaan yang dilakukan dalam jaminan pelayanan program keluarga berencana berupa pelayanan program KB oleh Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai di seluruh puskesmas dari setiap kecamatan yang mana pada programnya terdapat jaminan pelayanan KB gratis yang dilakukan setiap 3 bulan sekali secara berturut-turut.

Jaminan pelayanan program KB ini dilakukan untuk memudahkan pelayanan dalam program KB kepada masyarakat setempat sehingga Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai dapat mencapai sasaran akseptor atau pasangan usia subur yang akan mengikuti program KB.

Pelaksana dari jaminan pelayanan KB ini dilakukan oleh petugas bidang KB dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai yaitu PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana). Selain itu, pelaksana pada mitra kerja puskesmas yaitu dokter dan perawat yang bertugas dalam puskesmas setempat.

c. Substansi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana

Substansi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana bertugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana.

Dalam substansi pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana terdapat program penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai dengan fungsi sosialisasi mengenai pentingnya program Keluarga Berencana.

Substansi tersebut merupakan bentuk upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai pada pelaksanaan program Keluarga Berencana yaitu dilakukannya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan secara teratur yaitu setiap satu bulan sekali di satu lokasi Balai Penyuluhan di setiap kecamatan Kota Dumai dengan berbagai penyampaian materi yang berbeda. Selain itu juga terdapat jaminan pelayanan KB gratis yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

Namun, pada kenyataan masih ditemukan adanya kekurangan terhadap kegiatan program Keluarga Berencana tersebut seperti kurangnya penyebaran informasi mengenai waktu atau jadwal penyuluhan Program Keluarga Berencana serta informasi layanan program KB gratis kepada masyarakat yang menyebabkan kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap penyuluhan dan jaminan pelayanan KB gratis tersebut. Pernyataan tersebut berdasarkan dari beberapa sumber informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara kepada masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya

merupakan Akseptor dan Pasangan Usia Subur (PUS) di setiap Kecamatan Kota Dumai yang penulis kumpulkan hasil wawancaranya ke dalam tampilan berupa tabel I.1 berikut ini :

Tabel I.1
Hasil Wawancara pada Akseptor/Pasangan Usia Subur (PUS)

No.	Nama Akseptor/PUS	Usia	Alamat	Substansi Wawancara	Jawaban
1.	Inisial PS	26	Kec. Bukit Kapur, Kel. Bagan Besar	Bagaimana pelaksanaan program KB (penyuluhan&pelayanan KB gratis) di daerah anda?	Pelaksanaan masih kurang karena jarang ada informasi sosialisasi
2.	Inisial SA	23	Kec. Dumai Barat, Kel. Purnama	Bagaimana pelaksanaan program KB (penyuluhan&pelayanan KB gratis) di daerah anda?	Tidak pernah tau adanya penyuluhan di balai KB
3.	Inisial S	32	Kec. Dumai Kota, Kel. Sukajadi	Bagaimana pelaksanaan program KB (penyuluhan&pelayanan KB gratis) di daerah anda?	Tidak mengetahui jadwal penyuluhan
4.	Inisial S	36	Kec. Medang Kampai, Kel. Mundam	Bagaimana pelaksanaan program KB (penyuluhan&pelayanan KB gratis) di daerah anda?	Tidak mengetahui pelayanan KB gratis di puskesmas
5.	Inisial TA	32	Kec. Dumai Timur, Kel. Tanjung Palas	Bagaimana pelaksanaan program KB (penyuluhan&pelayanan KB gratis) di daerah anda?	Tidak mengetahui jadwal pelayanan KB gratis di puskesmas
6.	Inisial VA	34	Kec. Dumai Selatan, Kel. Bumi Ayu	Bagaimana pelaksanaan program KB (penyuluhan&pelayanan KB gratis) di daerah anda?	Tidak ada informasi mengenai penyuluhan
7.	Inisial F	29	Kec. Sungai Sembilan, Kel. Lubuk Gaung	Bagaimana pelaksanaan program KB (penyuluhan&pelayanan KB gratis) di daerah anda?	Tidak pernah tau adanya penyuluhan di balai KB

Sumber : Hasil Wawancara Tanggal 22 Januari 2023

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dengan masyarakat yang merupakan Akseptor dan Pasangan Usia Subur (PUS), menyatakan bahwa informasi penyuluhan dan layanan Program KB gratis di Kota Dumai belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan masih adanya masyarakat sebagai Akseptor/PUS yang belum mengetahui mengenai pelaksanaan penyuluhan di balai penyuluhan/kampung KB dan pelayanan program KB gratis di puskesmas setempat.

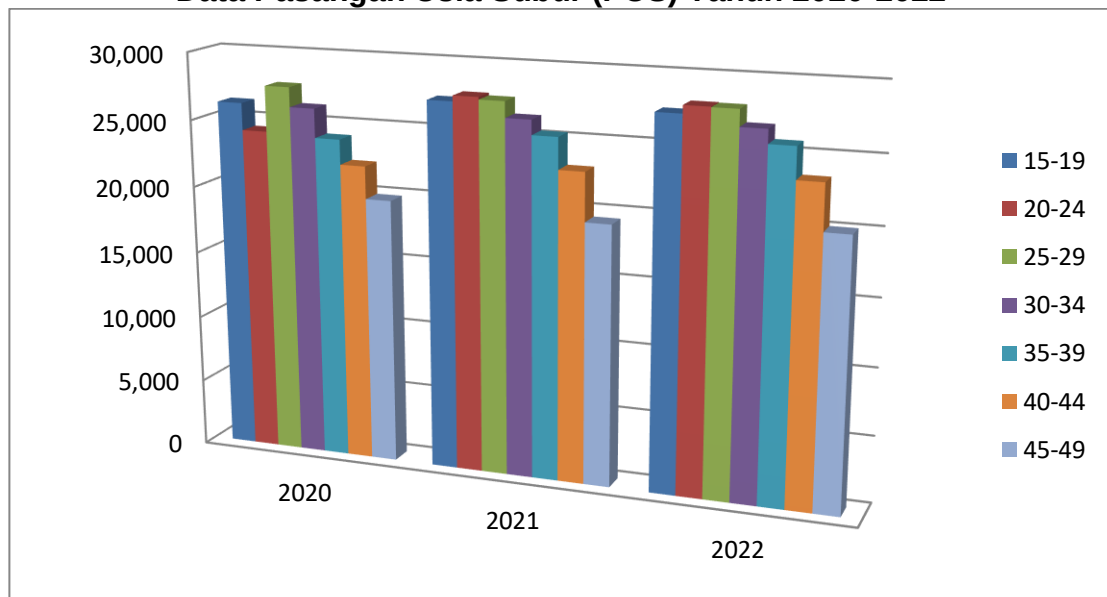
Sedangkan dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai, mengatakan dalam sesi wawancara peneliti bahwa informasi penyuluhan KB dan layanan KB gratis telah diinformasikan di setiap balai penyuluhan atau kampung KB dan puskesmas di seluruh kecamatan Kota Dumai.

Pernyataan dari masyarakat tersebut dapat menjadi permasalahan yang harus dibenahi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai. Dimana hal tersebut sangat penting untuk diperbaiki karena tujuan dari implementasi program KB ini adalah masyarakat dengan usia produktif atau dapat disebut dengan Pasangan Usia Subur (PUS).

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang berusia diantara 15-49 tahun yang memiliki organ reproduksi yang masih dapat berfungsi dengan baik sehingga sangat mungkin untuk terjadi

kehamilan. Untuk mengetahui jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Dumai dapat dilihat dari data grafik pada diagram I.2 dibawah :

Diagram I.2
Data Pasangan Usia Subur (PUS) Tahun 2020-2022



Sumber : Website Badan Pusat Statistik Kota Dumai

(<https://dumaikota.bps.go.id/>)

Dari diagram I.2 diatas dapat diketahui bahwa Pasangan Usia Subur (PUS) dengan rentang usia 15-39 tahun menjadi yang terbanyak hingga mencapai rata-rata 25.000 jiwa pada tiga tahun terakhir Maka dari itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai perlu meningkatkan kinerja dengan maksimal baik dalam pelayanan maupun pelaksanaan dalam program KB yang dijalankan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai telah memiliki mekanisme dan program yang dilakukan untuk memberikan pelayanan dan informasi atau pengetahuan mengenai keluarga berencana kepada masyarakat Kota Dumai. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai memiliki target dalam menyusun program kerja yang harus mereka kejar setiap tahun. Namun, tidak semua program kerja telah mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel I.2:

Tabel I.2
Data Target dan Pencapaian Program KB tahun 2022

No	Kecamatan	Metode Kontrasepsi														Total	
		IUD		MOW		MOP		Implan		Suntik		Pil		Kondom			
		T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
1.	Dumai Barat	7	13	15	0	1	0	29	36	289	211	126	69	31	9	498	338
2.	Dumai Timur	12	9	18	39	1	0	33	31	415	240	206	53	52	22	737	394
3.	Bukit Kapur	10	5	18	0	1	0	30	80	380	161	188	86	37	63	664	395
4.	Sungai Sembilan	5	2	15	0	1	0	31	32	309	49	91	138	22	17	474	238
5.	Medang Kampai	4	2	7	0	1	0	17	23	133	0	63	199	16	61	221	285
6.	Dumai Kota	8	20	13	0	1	0	29	16	306	209	135	14	33	15	525	274
7.	Dumai Selatan	10	10	15	1	1	0	30	20	308	42	129	67	39	56	532	196
Kota Dumai		56	61	101	40	7	0	199	238	2.120	912	938	626	230	243	3.615	2.120

Sumber data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022

Dari tabel I.2 terdapat target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai berdasarkan laporan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di setiap kecamatan. Target tersebut yaitu akseptor atau Pasangan Usia Subur (PUS)

yang disarankan untuk mengikuti program KB dengan bermacam metode seperti *Intra Uterine Device* (IUD), Metoda Operasi Wanita (MOW), Metoda Operasi Pria (MOP), Implan, Suntik, Pil, dan Kondom.

Dapat dilihat di tabel tersebut bahwa terdapat pencapaian (dengan keterangan C) yang tidak memenuhi target (dengan keterangan T) yang telah direncanakan dan ditetapkan. Dengan itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Dumai diharapkan dapat melaksanakan dan menerapkan program Keluarga Berencana (KB) dengan benar dan maksimal demi terwujudnya pengendalian jumlah penduduk dan keluarga sejahtera yang telah diharapkan.

Berangkat dari hal ini, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Kota Dumai. Maka dari itu, peneliti terdorong untuk melangsungkan penelitian dengan judul **“Implementasi program Keluarga (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka gejala permasalahan yang ada yaitu :

- a. Kurangnya informasi penyuluhan dan layanan Program Keluarga Berencana gratis oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai yang mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana .
- b. Masih ditemukan program Keluarga Berencana yang tidak terealisasi dengan maksimal oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai.

Berdasarkan gejala masalah yang ada diatas, peneliti menarik masalah pokok dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana (studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai)”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) (studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai).

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi program Keluarga Berencana (studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai).

2. Kegunaan

- a. Sebagai jembatan bagi masyarakat mengenai pemahaman bahwa program Keluarga Berencana (KB) dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga baik dalam ekonomi maupun kesehatan.
- b. Sebagai bahan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan wawasan lebih dalam lagi mengenai program atau kebijakan yang akan diimplementasikan secara langsung.
- c. Sebagai bahan acuan dan bahan perbandingan untuk penelitian terkait pada masa mendatang.